

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji pelaksanaan implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. Deskripsi lokasi penelitian dipaparkan sebagaimana uraian berikut.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Jl. A. Yani 160 Kartasura, Dusun III, sedahromo lor, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kode Pos. 57169. Telepon [\(0271\) 780857](tel:0271780857).

2. Sejarah Singkat SMP Muhammadiyah 1 Kartasura

SMP Muhammadiyah 1 Kartasura berdiri tanggal 1 Februari 1949, yang berlokasi di Desa Kemas Ngadirejo Kecamatan kartasura dengan status tanah meminjam. Pada tahun 1957 gedung sekolah pindah ke desa Sedahromo Kecamatan Kartasura. Status tanah dan gedung adalah Yayasan Muhmmadiyah dengan luas tanah kurang lebih 2000 m² , karena letaknya yang strategis yaitu di tepi jalan raya antara Surakarta dan Kartasura, tepatnya di jalan Ahmad yani nomor 160 kartasura, dapa dengan mudah dijangkau oleh Peneliti karyawan dan siswa.



Gambar 7. SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Tampak Depan

3. Visi, Misi SMP Muhammadiyah 1 Kartasura

- a. *Visi*. “Terciptanya kemandirian, berwawasan lingkungan, menguasai *IPTEK* dan berakhlak karimah”.

b. Misi Sekolah. Misi sekolah merupakan upaya atau tindakan yang akan dilakukan oleh warga sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. SMP Muhammadiyah 1 Kartasura adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dengan pendekatan holistik
- 2) Mengembangkan kesadaran lingkungan dan kecakapan *IPTEK*
- 3) Mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam seluruh aktivitas sekolah
- 4) Membentuk budaya karakter positif dalam kehidupan sehari-hari siswa

4. Struktur Organisasi SMP Muhammadiyah 1 Kartasura

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, struktur organisasi di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura dapat dilihat pada gambar organisasi di bawah ini.

No.	Nama	JK	NPM	Status	Jabatan	Jarak	Jurusan	Kode	Wongglor	Tempat tanggal lahir	Alamat
1	Yusuf Nis Rizkiy, M.Pd	P	1184915	GTJ	Kepala Sekolah	S2	Magister Administrasi Pendidikan	A	Bahasa Inggris	Wongglor, 06 Mei 1983	Jark RT 02/ RW 1 Makumbah, Kartasura
2	Katich Subagi, M.Pd	L	1184920	GTJ	Waka Sarpras	S2	Magister Administrasi Pendidikan	B	PPKn	Karanganyar, 16 Januari 1981	Trowongan RT. 04/ RW 11, Colomadu
3	Candra Maulana, S.Pd	L	1184916	GTJ	Waka Kedisiplinan	S1	Pendidikan Bahasa Indonesia	C	Bahasa Indonesia	Sukoharjo, 12 April 1984	Gedangan RT 02/ RW 10, Sukoharjo
4	Almas Munzir Sarbawudin, M.Pd	L	1184913	GTJ	Waka Kurikulum	S2	Mengajar Pendidikan Islam	D	PAI	Sukoharjo, 15 April 1982	Papungan RT 01/06 Pucangan
5	Lestari Muchlisah, S.Pd	P		GTJ	Waka Kurikulum	S1	Pendidikan Matematika	E	Matematika	Purwodadi, 15 November 1997	Dirya Kartasura RT 01/06 Pucangan Kartasura
6	Muhammad Rizkiy, M.Pd	L	1184924	GTJ	Waka Humas	S2	Magister Administrasi Pendidikan	F	Bahasa Inggris	Karanganyar, 07 September 1997	Gebondor RT 03/ RW 04, Jarkasuka, Karanganyar
7	Timas Anggini Benter, S.S	P	1184940	GTJ	Guru	S1	Sastra Jawa	G	Bahasa Jawa	Boyolali, 18 Maret 1983	Pemurus Ngir-wan, Ngir-wan, Boyolali
8	Rico Indira Shanti, S.Pd	P	1184918	GTJ	Guru	S1	PAI Tasyih	H	PAI	Sukoharjo, 8 Agustus 1978	Beras Wata RT 10/ RW 03, Sawikan, Boyolali
9	Pandey Setyanan, S.Pd	L	1184932	GTJ	Guru	S1	Pendidikan Olahraga	I	PJOK	Karanganyar, 02 Maret 1990	Dalem RT. 04/ RW VII, Metenik, Karanganyar
10	Fauziah Nurhayati, S.Pd	P	1184928	GTJ	Guru	S1	Pendidikan Bahasa Inggris	J	Bahasa Inggris	Karanganyar, 02 November 1990	Taman Hali RT. 02/ RW IV, Gedangan, Colomadu
11	Miftahus Solikhah, S.Pd	P	1184925	GTJ	Guru	S1	Pendidikan Biologi	K	IPA	Sukoharjo, 14 Desember 1986	Dh. Sanggah RT.03/ RW 1, Patungan, Kartasura
12	Riko Ari Wibisono, M.Pd	L	1184915	GTJ	Guru	S1	Pendidikan Matematika	L	Matematika	Gedangan, 12 Juni 1987	Dh. Katakun RT 03/ RW 01, Katakun, Kec. Bant, Kab. Gedangan
13	Siti Safa, S.Pd	L		GTJ	Guru	S1	Pendidikan Teknik Informatika	M	Informatika	Sukakarta, 11 Juni 2003	Gemetar JI. Siganting TNo. 10 RT 5/12 Mersahan, Banjarnegara
14	Qodri Winda, S.Pd	L	1412448	GTJ	Guru BK	S1	Bimbingan Konseling	N	BK	Karanganyar, 03 Mei 1983	Kandempu RT 02/ RW 10, Ngir-wan, Jark, Karanganyar
15	Lina Yeliana, S.Pd	P	1412448	GTJ	Guru BK	S1	Psikologi	O	BK	Klaten, 18 Januari 1985	Mangun Suparman RT 01/ RW IV, Mangun Suparman, Jark, Kec. Paksihaji
16	Ira Puji Primayana, S.Pd	P	1580493	GTJ	Guru	S1	Pendidikan Bahasa Indonesia	P	Bahasa Indonesia	Sukakarta, 24 November 1995	JL. Adi Sunarmo No. 1018, Tugel RT 03/ RW 005, Muksan, Banjarnegara, Sukakarta
17	Bugakun P.R.W, M.Pd	L	1543119	GTJ	Guru	S2		Q	IPS	Sukoharjo, 08 Juni 1989	Purubadjo RT 04/ RW 1, Tegilembo, Kec. Mayaban
18	Geger Sutrisno, S.T.	L	1412450	PTT	Kepala TU	S1	Teknik Informatik		TI	Bora, 22 October 1990	Monggen RT 01/ RW X, Monggen, Kec. Jatinom
19	Yuzun Setyaning, S.M.	P	1384954	PTT	Staff TU	S1	Kesehatan Masyarakat		TI	Boyolali, 29 Juli 1982	Wongglor RT 02/ RW 03, Dibal, Kec. Ngemplak, Boyolali
20	Muhammad Nurrobbil, M.M.	L	1412449	PTT	Staff TU	S2	Manajemen Disorosi		TI	Karanganyar, 04 Juni 1985	Ngemplak RT 02/ RW 05, Dorehutan, Kec. Ngemplak, Boyolali
21	Anisa Kambasi Mustamah, S.E	P	1580492	PTT	Staff TU	S1	Ekonomi		TI	Surenanta, 23 September 1983	Panun Girah Tura 1 Blok A6 RT 11 / RW 4, Gumpang, Kartasura, Sukoharjo

NBS : 20203112015 NDS : C27032004 NIS : 420/3929.A/2002 NPSN : 20310731

Gambar 8. Struktur Organisasi SMP Muhammadiyah 1 Kartasura

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura menjadi aspek krusial yang perlu dikaji secara mendalam guna mengoptimalkan proses belajar mengajar di era digital. Keberhasilan implementasi ini berakar pada perencanaan yang matang serta pelaksanaan yang konsisten, sehingga mampu membentuk praktik pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi siswa.

a. Bagaimana Implementasi Pendidikan Demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura

1) *Pemahaman Nilai-Nilai Demokrasi*, berdasarkan hasil observasi pada jam pelajaran Pendidikan Pancasila di Kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Kartasura teramati bahwa ada siswa yang memiliki pemahaman nilai-nilai demokrasi.

Hasil wawancara dengan Bapak Kukuh Subagdi, M.Pd selaku guru Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura pada hari Rabu, 15 April 2026 menjelaskan bahwa:

Selama proses pembelajaran melibatkan semua siswa tdk ada yg dibeda bedakan, tdk ada diskriminasi maka siswa itu akan merasa nyaman merasa dihargai, merasa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat sehingga siswa merasa nyaman

Pendapat lain dari hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Muhson Burhanudin M.Pd selaku wakil kepala bidang al islam kemuhammadiyah pada hari Rabu, 15 April 2026 menjelaskan bahwa:

Untuk program khusus di Mujibos ini selain program demokrasi mungkin yang kecil itu sekalian kecil di kelas ya, kelas kan ada biasanya ada pemilihan pengurus apa namanya kelas, kultur kelas kan dari ketua dan wakil dan sebagainya kalau di Mujitos ini biasanya Pemirsa 1 Batasura ada program demokrasi, pesta demokrasi itu biasanya setahun sekali ketika pemilihan ketua dan wakil IPM ini program terjadinya keiswaan maksudnya hamya sekali

Pendapat lain dari hasil wawancara dengan Khansa Maredyasta P A selaku Siswa Kelas 7 Tahfidz SMP Muhammadiyah 1 Kartasura pada hari Jum'at, 17 April 2026 menjelaskan bahwa: “Adanya persamaan hak antar siswa, tidak ada yang dibeda-bedakan oleh guru atau teman.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kukuh Subagdi, M.Pd sebagai guru Pendidikan Pancasila, Bapak Ahmad Muhson Burhanudin M.Pd sebagai wakil kepala bidang al islam kemuhammadiyah dan Khansa Maredyasta P A selaku Siswa Kelas 7 Tahfidz SMP Muhammadiyah 1 Kartasura pada Rabu, 15 April 2026, dapat disimpulkan bahwa Implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam menciptakan ekosistem kelas yang inklusif dan partisipatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kukuh Subagdi, M.Pd. selaku guru Pendidikan Pancasila, kunci utama dalam menanamkan nilai demokrasi adalah dengan meniadakan diskriminasi di dalam kelas. Beliau menegaskan bahwa ketika proses pembelajaran melibatkan seluruh siswa tanpa membedakan latar belakang, siswa akan merasa lebih nyaman dan dihargai. Rasa aman inilah yang menjadi fondasi bagi siswa untuk berani menggunakan haknya dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.

Senada dengan hal tersebut, Khansa Maredyasta P.A., siswa kelas 7 Tahfidz, mengonfirmasi bahwa praktik demokrasi telah dirasakan langsung oleh siswa melalui adanya persamaan hak. Tidak adanya perlakuan istimewa atau diskriminatif dari guru maupun sesama teman menciptakan iklim kelas yang harmonis, di mana setiap siswa merasa memiliki posisi yang setara dalam mengakses ilmu pengetahuan.

Selain di dalam ruang kelas, praktik demokrasi di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura juga diwujudkan melalui program kerja kesiswaan yang terstruktur. Bapak Ahmad Muhson Burhanudin, M.Pd. selaku Wakil Kepala Bidang Al-Islam Kemuhammadiyah menjelaskan bahwa selain praktik kecil seperti pemilihan pengurus kelas, sekolah memiliki agenda tahunan besar yang disebut sebagai "Pesta Demokrasi". Agenda ini merupakan momentum pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) yang dilakukan secara transparan dan melibatkan seluruh elemen sekolah. Program ini menjadi laboratorium nyata bagi siswa untuk mempraktikkan prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil.

Secara keseluruhan, integrasi antara nilai-nilai yang diajarkan oleh Bapak Kukuh di kelas dengan program kesiswaan di MUJITOS membuktikan bahwa pendidikan demokrasi tidak hanya berhenti pada teori di buku teks, tetapi telah

menjadi kultur sekolah. Hal ini berhasil memicu pikiran kritis siswa dan mendorong inisiatif untuk terlibat aktif dalam kehidupan berorganisasi yang berakar pada pemikiran demokratis.

2) *Peran Guru dalam Internalisasi Nilai Demokrasi*, berdasarkan hasil observasi di kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Kartasura, guru Pendidikan Pancasila, Kukuh Subagdi, M.Pd mengedepankan prinsip inklusivitas dengan melibatkan seluruh siswa tanpa membedakan latar belakang mereka. Pendekatan non-diskriminatif ini menciptakan atmosfer kelas yang kondusif, di mana setiap siswa merasa nyaman dan dihargai keberadaannya. Melalui lingkungan belajar yang suportif tersebut, siswa merasa memiliki ruang aman untuk berani mengemukakan pendapat dan berekspresi secara bebas. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai demokrasi telah diimplementasikan secara nyata dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

Hasil wawancara dengan Bapak Kukuh Subagdi, M.Pd selaku guru Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura pada hari Rabu, 15 April 2026 menjelaskan bahwa:

Kalau nilai2 dikelas tentunya pada kegiatan belajar mengajar, guru semaksimal mungkin di dalam proses pembelajaran maka guru tidak pilih kasih, memberi ruang semua siswa untuk berpendapat, setiap siswa yang berpendapat diberikan penghargaan entah itu dengan cara mengacungkan jempol atau dengan cara satu kata ucapan apresiasi, sehingga muncul kepastian setiap siswa untuk percaya diri dan penanaman demokrasi akan berjalan karena setiap siswa terlibat melalui tugas secara kelompok dengan acak yang bertujuan tidak monoton atau hanya itu itu saja anggota kelompoknya, kemudian dalam proses metode pembelajaran menggunakan selain kelompok itu ada, memberi tanggung jawab kepada siswa

Pendapat lain dari hasil wawancara dengan Sekar Nana Aminah selaku Siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Kartasura pada hari Jum'at, 17 April 2026 menjelaskan bahwa: "Nilai di mana keputusan diambil secara bersama-sama untuk kepentingan orang banyak, bukan satu orang saja."

Pendapat lain dari hasil wawancara dengan Pratama Budy Saputra selaku Siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Kartasura pada hari Jum'at, 17 April 2026 menjelaskan bahwa: "Adanya persamaan hak antar siswa, tidak ada yang dibedakan oleh guru atau teman."

Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura telah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan partisipatif bagi seluruh siswa. Hal ini tercermin dari praktik di dalam kelas di mana setiap siswa diberikan ruang yang sama untuk berkembang tanpa adanya sekat diskriminasi. Berdasarkan hasil wawancara pada Rabu, 15 April 2026, Bapak Kukuh Subagdi, M.Pd. selaku guru Pendidikan Pancasila menegaskan bahwa kunci kenyamanan siswa dalam belajar adalah tidak adanya perbedaan perlakuan. Beliau menjelaskan bahwa ketika proses pembelajaran melibatkan semua siswa tanpa memandang latar belakang, siswa akan merasa dihargai dan lebih berani untuk mengemukakan pendapat secara terbuka. Kondisi psikologis yang nyaman inilah yang menjadi fondasi bagi internalisasi nilai-nilai demokrasi di sekolah.

Senada dengan temuan tersebut, siswa Pratama Budy Saputra dari kelas VII dalam wawancara pada Jumat, 17 April 2026, memberikan testimoni mengenai kuatnya prinsip kesetaraan yang ia rasakan di lingkungan sekolah. Menurutnya, adanya persamaan hak antar siswa di mana tidak ada lagi perlakuan istimewa atau perbedaan baik oleh guru maupun sesama rekan sejawat, menjadi bukti nyata penerapan demokrasi dalam keseharian mereka. Pemahaman mengenai demokrasi ini pun meluas hingga ke aspek pengambilan keputusan kolektif. Siswa Sekar Nana Aminah dari kelas VIII, dalam wawancara pada hari yang sama, menjelaskan bahwa siswa telah memahami esensi musyawarah di mana keputusan diambil untuk kepentingan bersama, bukan demi ego satu individu semata. Integrasi antara suasana kelas yang adil dan pemahaman kritis siswa terhadap nilai kolektivitas ini menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura tidak hanya dipahami sebagai teori, melainkan telah mewujudkan dalam praktik sosial dan perilaku siswa di lingkungan pendidikan.

3) *Penerapan Nilai Demokrasi dalam Lingkungan Sekolah*, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura, guru Pendidikan Pancasila menekankan bahwa esensi demokrasi dalam pembelajaran harus berpijak pada asas kebersamaan untuk mencegah dominasi kepentingan kelompok. Dalam praktiknya, guru menanamkan pemahaman wawasan nusantara sebagai fondasi utama bagi siswa guna menyikapi keberagaman dan pluralitas di Indonesia sebelum masuk pada

penerapan nilai-nilai demokrasi. Melalui pendekatan ini, saya dapat melihat adanya upaya sistematis dalam membangun iklim demokrasi di kelas, di mana pembelajaran dirancang secara kolaboratif melalui metode kelompok untuk menguatkan sikap toleransi dan gotong royong. Hal tersebut bertujuan agar esensi demokrasi, yaitu pencapaian tujuan bersama dengan mengesampingkan kepentingan pribadi, dapat terinternalisasi secara nyata dalam perilaku keseharian siswa di sekolah.

Hasil wawancara dengan Bapak Kukuh Subagdi, M.Pd selaku guru Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura pada hari Rabu, 15 April 2026 menjelaskan bahwa:

Esensial dari demokrasi itu adalah kebersamaan, demokrasi itu berjalan atau tidaknya dipengaruhi oleh asas kebersamaan, ketika orang mementingkan kelompok bisa jadi demokrasi tidak bisa berjalan, proses demokrasinya dijalani akan tetapi hasil demokrasinya tidak berjalan karena mementingkan kelompok makanya untuk demokrasi yang kita tanamkan untuk siswa adalah wawasan nusantara, karena di Indonesia ini memiliki banyak keberagaman, negara dengan pulau yang banyak, dan bersifat plural sehingga dengan di fahamkannya anak-anak tentang wawasan nusantara baru kita bisa menerapkan pada demokrasi, karena demokrasi sendiri esensialnya adalah kebersamaan satu tujuan. Kita juga menanamkan pembelajaran yang bersifat toleransi, pembelajaran dengan cara kelompok, sehingga adanya toleransi dan gotong royong sehingga esensial demokrasi bisa tercapai dengan mengesampingkan kepentingan pribadi.

Pendapat lain dari hasil wawancara dengan Asiah Qonita Zahra Siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Kartasura pada hari Jumat, 17 April 2026 menjelaskan bahwa: “Demokrasi itu artinya kebebasan berpendapat dan menghargai perbedaan yang ada di kelas.”

Berdasarkan Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kukuh Subagdi, M.Pd., selaku guru Pendidikan Pancasila, serta siswi Asiah Qonita Zahra dari kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Kartasura, dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan demokrasi di sekolah tersebut berpusat pada penanaman asas kebersamaan dan penghargaan terhadap keberagaman. Bapak Kukuh Subagdi menjelaskan bahwa esensi demokrasi hanya dapat berjalan optimal jika siswa mampu mengesampingkan kepentingan kelompok demi mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, penguatan wawasan nusantara

menjadi fondasi utama dalam pembelajaran agar siswa memahami realitas pluralitas Indonesia sebelum menerapkan prinsip demokrasi. Dalam praktiknya, guru mengadopsi metode pembelajaran kelompok yang menekankan pada nilai toleransi dan gotong royong sebagai manifestasi nyata dari nilai-nilai demokratis.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Asiah Qonita Zahra yang memandang demokrasi sebagai ruang kebebasan untuk berpendapat sekaligus tanggung jawab untuk menghargai perbedaan yang muncul di lingkungan kelas. Sinergi antara pemahaman konseptual mengenai wawasan nusantara yang disampaikan guru dengan pengalaman praktis siswa dalam berinteraksi menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura diarahkan untuk membentuk karakter siswa yang inklusif, kolaboratif, dan mampu menyelaraskan kebebasan individu dengan kepentingan kolektif.

b. Kendala dan Solusi dalam implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura

1) *Pemahaman Nilai-Nilai Demokrasi*, terlihat bahwa pemahaman Siswa terhadap nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila mulai menunjukkan perkembangan positif, meskipun internalisasinya belum mencapai tahap optimal. Hal ini teridentifikasi dari sikap Siswa yang mulai menghargai perbedaan pendapat saat diskusi, namun masih banyak di antara mereka yang ragu untuk menerapkan prinsip kesetaraan dan kebebasan berpendapat secara mandiri. Oleh karena itu, Siswa masih memerlukan pancingan atau stimulasi berkelanjutan, seperti melalui simulasi musyawarah atau penggunaan media digital interaktif, guna memotivasi mereka agar lebih percaya diri dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokratis dalam lingkungan kelas.

Hasil wawancara dengan Bapak Kukuh Subagdi, M.Pd selaku guru Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura pada hari Rabu, 15 April 2026 menjelaskan bahwa:

Nilai yang paling utama adalah musyawarah (syura), menghargai perbedaan pendapat, dan tanggung jawab. Di lingkungan Muhammadiyah, ini dikaitkan dengan adab bermuamalah, di mana kebebasan berpendapat harus dibarengi dengan etika dan rasa hormat terhadap sesama.

Pendapat lain dari hasil wawancara dengan Asiah Qonita Zahra Siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Kartasura pada hari Jumat, 17 April 2026 menjelaskan bahwa:

Kalau menurutku, demokrasi itu intinya kita bebas kasih pendapat tapi tetap tertib. Contohnya pas pelajaran Pendidikan Pancasila, kita sering diajak diskusi kelompok. Jadi kita paham kalau di demokrasi itu suara semua orang itu penting, nggak cuma suara yang paling keras aja.

Pendapat lain dari hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Muhson Burhanudin M.Pd selaku wakil kepala bidang al islam kemuhammadiyah pada hari Rabu, 15 April 2026 menjelaskan bahwa:

Di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura ini, nilai demokrasi bukan sekadar materi di buku teks Pendidikan Pancasila. Kami memaknainya sebagai pembiasaan. Dalam kurikulum operasional kami, demokrasi itu artinya memberikan ruang bagi siswa untuk berpendapat dan menghargai perbedaan. Kami ingin siswa paham bahwa suara mereka itu berharga, namun tetap harus berlandaskan etika dan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada April 2026, implementasi pendidikan demokrasi di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura menunjukkan adanya sinergi antara nilai kewarganegaraan, kebijakan sekolah, dan praktik di kelas. Bapak Kukuh Subagdi, M.Pd. selaku guru Pendidikan Pancasila menekankan bahwa nilai utama yang ditanamkan adalah musyawarah (*syura*), penghormatan terhadap perbedaan, dan tanggung jawab, yang secara khusus diintegrasikan dengan adab bermuamalah agar kebebasan berpendapat tetap berpijak pada etika dan rasa hormat. Senada dengan hal tersebut, Bapak Ahmad Muhson Burhanudin, M.Pd. selaku Wakil Kepala Bidang AIK menegaskan bahwa demokrasi telah menjadi bagian dari habituasi dalam kurikulum operasional sekolah, di mana setiap siswa diberikan ruang untuk berpendapat sebagai bentuk pengakuan bahwa suara mereka berharga, namun tetap harus selaras dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Di sisi lain, dari perspektif siswa, Asiah Qonita Zahra (Kelas VIII) mengungkapkan bahwa pemahaman demokrasi tersebut terwujud secara praktis melalui diskusi kelompok yang sering dilakukan dalam pelajaran Pendidikan Pancasila. Hal ini memberikan pemahaman kepada siswa bahwa esensi demokrasi adalah kebebasan berpendapat yang tetap tertib, di mana setiap suara memiliki kedudukan yang penting dan setara tanpa adanya dominasi dari pihak tertentu.

2) *Peran Guru dalam Internalisasi Nilai Demokrasi*, dalam proses internalisasi nilai-nilai demokrasi, terlihat bahwa peran guru sebagai fasilitator ruang dialogis masih menghadapi tantangan pada tahap prakarsa siswa. Hal ini tercermin dari kecenderungan guru yang masih mendominasi jalannya diskusi,

sementara keterlibatan siswa dalam mengemukakan pendapat atau menyanggah argumen secara kritis masih tergolong minim. Saat guru membuka ruang untuk bermusyawarah dalam pengambilan keputusan di kelas, sebagian besar siswa tampak ragu untuk memulai inisiatif, lebih memilih untuk mengikuti suara mayoritas tanpa melakukan telaah mendalam, atau sekadar menunggu instruksi final dari guru. Fenomena ini mengindikasikan bahwa upaya guru dalam mentransformasikan ruang kelas menjadi laboratorium demokrasi belum sepenuhnya diimbangi dengan keberanian siswa untuk mempraktikkan kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab dan mandiri.

Hasil wawancara dengan Bapak Kukuh Subagdi, M.Pd selaku guru Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura pada hari Senin, Rabu, 15 April 2026 menjelaskan bahwa:

Saya sering menggunakan metode *Project Based Learning (PjBL)* atau diskusi kelompok berbasis masalah (*Case Study*). Dengan cara ini, siswa langsung mempraktikkan bagaimana pembagian tugas secara adil dan bagaimana mencapai mufakat dalam menyelesaikan proyek.

Pendapat lain dari hasil wawancara dengan Sekar Nana Aminah selaku Siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Kartasura pada hari Jumat, 17 April 2026 menjelaskan bahwa: “Paling seru pas sesi presentasi. Kita bebas tanya apa aja ke kelompok yang maju, terus gurunya jadi penengah kalau diskusinya mulai panas.”

Pendapat lain dari hasil wawancara dengan Khansa Maredyasta P A selaku Siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Kartasura pada hari Jumat, 17 April 2026 menjelaskan bahwa: “Biasanya guru kasih studi kasus tentang berita yang lagi viral. Kita diajak mikir, kalau kita di posisi itu, solusi yang demokratis gimana.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kukuh Subagdi, M.Pd selaku guru Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura pada Rabu, 15 April 2026, dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan demokrasi diwujudkan melalui penggunaan metode *Project Based Learning (PjBL)* dan diskusi kelompok berbasis masalah (*Case Study*). Bapak Kukuh mengamati bahwa melalui metode ini, siswa dapat mempraktikkan langsung prinsip-prinsip demokrasi, seperti pembagian tugas secara adil dan pencapaian mufakat dalam penyelesaian proyek.

Hal ini selaras dengan pengalaman siswa kelas VIII, Sekar Nana Aminah, yang menyoroti dinamika sesi presentasi sebagai ruang bebas berpendapat, di mana guru berperan sebagai moderator ketika terjadi perdebatan yang intens. Senada dengan hal tersebut, Khansa Maredyasta P.A., siswa kelas VII, mengonfirmasi bahwa internalisasi nilai demokratis juga dilakukan melalui analisis studi kasus terhadap isu-isu viral, yang melatih siswa untuk berpikir kritis dalam mencari solusi yang demokratis dan relevan dengan realitas sosial saat ini.

3) *Penerapan Nilai Demokrasi dalam Lingkungan Sekolah*, penerapan nilai demokrasi masih menghadapi kendala perilaku, di mana banyak siswa terlihat ragu-ragu dan pasif saat diminta untuk mengambil keputusan bersama atau menyatakan pendapat dalam forum kelas. Sebagian besar siswa cenderung memilih untuk menjadi pengikut setia (*follower*) dan menyerahkan tanggung jawab pengambilan keputusan sepenuhnya kepada ketua kelas atau figur yang dianggap lebih dominan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran akan kesetaraan suara belum sepenuhnya merata; siswa yang merasa kurang populer atau kurang pandai lebih memilih untuk menarik diri dari perdebatan, merasa bahwa opini mereka tidak akan membawa pengaruh besar terhadap keputusan akhir kelompok atau kelas.

Hasil wawancara dengan Bapak Kukuh Subagdi, M.Pd selaku guru Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura pada hari Senin, Rabu, 15 April 2026 menjelaskan bahwa:

Selain pemilihan ketua kelas secara formal, kami menerapkan pembuatan "Kesepakatan Kelas" di awal semester. Jadi, aturan kelas bukan dibuat oleh guru saja, melainkan hasil kesepakatan bersama yang harus ditaati bersama pula.

Pendapat lain dari hasil wawancara dengan Siswa Pratama Budy Saputra selaku Siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Kartasura pada hari Jumat, 17 April 2026 menjelaskan bahwa: “Ada kotak saran di depan kantor. Kita bisa nulis kritik atau saran buat sekolah tanpa perlu takut dimarahin.”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kukuh Subagdi, M.Pd selaku guru Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura pada Rabu, 15 April 2026, serta siswa kelas VII Pratama Budy Saputra pada Jumat, 17 April 2026, dapat diidentifikasi bahwa implementasi pendidikan demokrasi di sekolah tersebut telah melampaui batas prosedural formal. Dari sudut pandang guru,

praktik demokrasi diwujudkan melalui metode partisipatif dalam penyusunan "Kesepakatan Kelas" di awal semester, yang mengubah paradigma disiplin dari otoritas guru menjadi tanggung jawab kolektif yang ditaati bersama. Hal ini menunjukkan adanya upaya internalisasi nilai-nilai kedaulatan dalam lingkup terkecil pembelajaran. Perspektif tersebut diperkuat oleh pengalaman siswa yang merasakan adanya ruang publik yang aman melalui ketersediaan kotak saran di depan kantor. Keberadaan fasilitas ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan kritik dan aspirasi secara bebas tanpa rasa takut, yang secara sistematis membangun keberanian berpendapat dan budaya transparansi di lingkungan sekolah. Sebagai hasilnya, pendidikan demokrasi tidak hanya dipahami sebagai teori pemilihan ketua kelas, melainkan dirasakan langsung oleh siswa sebagai praktik kewarganegaraan yang nyata.

C. Pembahasan

Penelitian ini membahas mengenai implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila pada siswa di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. Penelitian ini bertujuan mengkaji proses implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila pada siswa, mengeksplorasi berbagai kendala dalam implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila pada siswa, serta mendeskripsikan solusi dalam mengatasi kendala implementasi pendidikan demokrasi pada siswa di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. Pembahasan ini dipaparkan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dikaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan penelitian ini.

1. Implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura, implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila telah dilaksanakan secara terintegrasi dalam proses pembelajaran di kelas maupun dalam budaya sekolah. Implementasi tersebut tampak melalui pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh siswa untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran, kebebasan menyampaikan pendapat, pembiasaan musyawarah, penghargaan terhadap perbedaan, serta pelaksanaan kegiatan demokratis seperti pemilihan pengurus kelas dan pemilihan Ketua serta Wakil Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Dengan demikian, pendidikan demokrasi tidak hanya diajarkan sebagai konsep, tetapi juga dipraktikkan secara langsung dalam kehidupan sekolah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pemikiran John Dewey (1916) yang menyatakan bahwa sekolah harus menjadi miniatur masyarakat demokratis. Menurut Dewey, demokrasi dalam pendidikan bukan sekadar mengajarkan bentuk pemerintahan, melainkan membiasakan peserta didik untuk hidup dalam suasana yang menumbuhkan partisipasi, kebebasan berpikir, dan kerja sama sosial. Dalam konteks SMP Muhammadiyah 1 Kartasura, prinsip tersebut tercermin dari keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran dan dalam berbagai kegiatan sekolah yang memberi ruang partisipasi secara nyata.

Penerapan awal diketahui bahwa tenaga pendidik seperti yang diwawancarai, yaitu guru Pendidikan Pancasila dan Wakil Kepala Bidang AIK, memahami mengenai pendidikan demokrasi yang harus diberikan kepada peserta didik. Hal tersebut menjadi langkah awal sekolah untuk lebih berfokus mengembangkan iklim kelas yang non-diskriminatif agar siswa lebih tanggap terhadap hak dan kewajibannya. Hal ini selaras dengan penelitian Maryam dkk. (2022) yang membuktikan bahwa pembelajaran pada mata pelajaran PKn efektif digunakan untuk implementasi nilai-nilai demokrasi dan memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan karakter demokratis siswa. Sekolah memilih strategi pembelajaran partisipatif sebagai salah satu taktik utama internalisasi nilai-nilai demokrasi.

Program pembelajaran demokratis ini membuat siswa dibimbing, diberikan contoh untuk menghargai perbedaan, serta memiliki rasa tanggung jawab untuk mencapai mufakat. Kegiatan yang dilaksanakan saat pembelajaran Pendidikan Pancasila ini sengaja dipilih yang sesuai dengan kemampuan mereka serta sering diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan mengemukakan pendapat di kelas, berdiskusi kelompok secara acak, hingga menyusun kesepakatan kelas merupakan aktivitas yang pastinya dilakukan demi menunjang kenyamanan bersama. Bila kegiatan tersebut dilakukan secara berulang, maka peserta didik secara tidak langsung merawat kultur demokrasi mereka setiap hari dan berdampak positif bagi pembentukan kepribadian yang inklusif. Hal ini selaras dengan penelitian Yusuf dkk. (2019) yang memaparkan bahwa terdapat berbagai macam kegiatan pembiasaan di sekolah yang melatih siswa untuk terbuka, berani mengemukakan pendapat, dan menempatkan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran. Peran guru juga menambah efektivitas

internalisasi nilai demokrasi pada peserta didik seperti memberi penjelasan, memberi arahan, memberi hadiah, dan menegur.

Peran guru sebagai penunjang siswa memiliki atau mengimplementasikan nilai demokrasi adalah dengan memberikan penjelasan kepada peserta didik mengenai pentingnya musyawarah (syura) bagi kemaslahatan bersama. Tentunya kegiatan ini tidak hanya berlaku saat jam pelajaran formal saja, tetapi juga diterapkan saat pemilihan pengurus kelas maupun agenda makro seperti "Pesta Demokrasi" pemilihan ketua IPM sekolah. Kemudian guru memberi arahan atau membimbing peserta didik dalam melakukan kerja kelompok seperti membagi anggota secara acak supaya merata dan menghindari dominasi kelompok tertentu. Salah satu peran guru yang penting adalah mengingatkan peserta didik dan menegur mereka secara persuasif bila memotong pembicaraan orang lain atau melanggar aturan main diskusi. Salah satu contohnya adalah guru memberi masukan kepada peserta didik untuk selalu menggunakan kotak saran sekolah dalam menyalurkan kritik secara sehat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan sebagai berikut.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (Republik Indonesia, 2005).

Inovasi baru dalam menumbuhkan semangat peserta didik dalam melaksanakan praktik demokrasi yaitu dengan membuat kegiatan pembelajaran berbasis masalah, seperti metode *Project Based Learning* (PjBL) dan analisis studi kasus isu-isu viral. Sekolah dan guru mengadakan diskusi berbasis masalah ini dengan tujuan menggugah semangat, kerja sama, dan gotong royong antar peserta didik untuk memecahkan persoalan secara demokratis. Setidaknya peserta didik yang tadinya pasif atau ragu untuk diajak mengemukakan pendapat bisa tergugah kesadarannya untuk ikut aktif bersama teman-teman yang lainnya karena kegiatan ini menggunakan pendekatan interaktif serta dikaitkan dengan konteks digital yang dekat dengan mereka.

2. Kendala apa saja dalam implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura

Implementasi pendidikan demokrasi merupakan strategi dalam membentuk generasi baru yang sadar akan hak, kewajiban, dan nilai-nilai

kesetaraan warga negara. Internalisasi pendidikan demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses mekanisme pendidikan karakter sebagai upaya mewujudkan kultur kedaulatan siswa pada generasi baru. Sebagai upaya dalam menerapkan tujuan tersebut, maka perlu dibentuknya pembiasaan demokratis yang terstruktur di dalam kelas. Melalui kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila, peserta didik diberi penjelasan dan contoh untuk menghargai perbedaan pendapat sehingga sedari dini sudah diajarkan mengenai etika bermuamalah. Tentu saja perjalanan membentuk generasi baru yang demokratis menemukan kendala.

Penelitian ini mendapatkan hasil melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada guru Pendidikan Pancasila, Wakil Kepala Bidang AIK, serta siswa kelas VII dan VIII Tahfidz SMP Muhammadiyah 1 Kartasura bahwa terdapat beberapa kendala dalam implementasi pendidikan demokrasi. Terdapat dua faktor utama yang menjadi kendala, yaitu kendala psikologis-partisipatif dan kendala habituasi nilai.

Faktor yang pertama, yaitu kendala psikologis-partisipatif, peneliti masih mendapati peserta didik yang acuh atau ragu untuk mengemukakan pendapat secara mandiri, serta cenderung menjadi pengikut setia (*follower*) suara mayoritas tanpa melakukan telaah kritis. Salah satu penyebabnya yaitu rasa kurang percaya diri pada siswa yang merasa dirinya kurang dominan atau kurang populer, sehingga mereka menarik diri dari perdebatan di kelas. Hal ini sejalan dengan penelitian Nur dan Sudarsono (2018) yang menjelaskan bahwa adanya perbedaan individual dan kemampuan antar siswa menjadi hambatan tersendiri dalam menciptakan partisipasi yang merata di kelas.

Faktor kedua yaitu kendala habituasi nilai, internalisasi prinsip kesetaraan belum berjalan optimal dan siswa masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada instruksi final atau keputusan akhir dari guru. Kendala prosedural-etik ini sering dirasakan karena adanya tantangan nyata dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi siswa agar tetap berjalan tertib serta selaras dengan adab etika keislaman di sekolah. Kesulitan mentransformasikan ruang kelas menjadi laboratorium demokrasi yang mandiri inilah yang membuat internalisasi nilai belum mencapai tahap paling optimal.

3. Solusi untuk mengatasi kendala implementasi pendidikan demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura

Berdasarkan hasil observasi, dapat diidentifikasi bahwa solusi yang diperlukan adalah perlunya penguatan stimulasi berkelanjutan melalui teknik simulasi musyawarah dan pemanfaatan media digital interaktif untuk

meruntuhkan keraguan psikologis siswa, optimalisasi peran guru sebagai fasilitator ruang dialogis yang memancing inisiatif siswa melalui metode *Project Based Learning* (PjBL) dan studi kasus isu viral (Rini, 2017), serta perluasan sistem habituasi sekolah seperti pembuatan kesepakatan kelas kolektif dan pengoptimalan kotak saran guna menjamin terciptanya budaya kedaulatan siswa yang inklusif, aman, serta tetap selaras dengan etika adab bermuamalah Al-Islam dan Kemuhammadiyah (Sayektiningsih dkk., 2017 dan Laksono, 2017).

D. Keterlibatan Peneliti

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini bersifat studi kasus tunggal yang dilaksanakan hanya di satu lokasi, yaitu SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. Karakteristik khusus sekolah, budaya organisasi, serta latar belakang siswa di sekolah tersebut membuat temuan mengenai implementasi pendidikan demokrasi ini bersifat spesifik. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi secara mentah untuk mewakili potret pendidikan demokrasi di sekolah menengah pertama lainnya yang memiliki latar belakang sosiokultural berbeda.
2. Fokus penelitian ini secara eksklusif hanya menelaah proses pendidikan demokrasi di dalam ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Hal ini mengakibatkan hasil penelitian tidak menggambarkan bagaimana nilai-nilai demokrasi diintegrasikan dalam mata pelajaran lain atau dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tersebut. Selain itu, temuan ini terbatas pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP), sehingga tidak dapat menjadi acuan mutlak bagi jenjang pendidikan dasar maupun menengah atas.
3. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif yang mengandalkan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, validitas data sangat bergantung pada keterbukaan informan serta ketajaman interpretasi peneliti. Meskipun data yang dihasilkan mendalam dan kontekstual terkait implementasi nilai demokrasi di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura, sifat data ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk memahami fenomena secara komprehensif pada lokus penelitian tertentu.